



Welfare : Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial  
Volume 9 , Issues 1, 2020

---

SINERGI STAKEHOLDER UNTUK KESEJAHTERAAN : Studi Kelompok Wanita Tani Sumber Patedhan Program CSR PT Pertamina (Persero) Integrated Terminal Cilacap

Author : Erna Fitri Utami, Rahadiyand Aditya, Ardy Sugianto  
Source : Welfare : Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial Volume 9, Issues 1, 2020, 53-77.

To Cite the Article :

SINERGI STAKEHOLDER UNTUK KESEJAHTERAAN: Studi Kelompok Wanita Tani Sumber Patedhan Program CSR PT Pertamina (Persero) Integrated Terminal Cilacap, Erna Fitri Utami, Rahadiyand Aditya, Ardy Sugianto. Welfare : Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial Volume 9, Issues 1, 2020

Copyright © 2020 Welfare : Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial  
ISSN : 2302-3759 (Print), ISSN : 2685-8517 (Online)

 **Pogram Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial**  
**Fakultas Dakwah dan Komunikasi**  
**UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**



**SINERGI STAKEHOLDER UNTUK KESEJAHTERAAN : Studi Kelompok Wanita Tani Sumber Patedhan Program CSR PT Pertamina (Persero) Integrated Terminal Cilacap**

**Erna Fitri Utami**

Ernafitriutami28@gmail.com

Prodi Pengembangan Masyarakat Islam UIN Sunan Kalijaga

**Rahadiyand Aditya**

Rahadiyand.aditya@uin-suka.ac.id

UIN Sunan Kalijaga

**Ardy Sugianto**

Ardi.sugianto@pertamina.com

PT Pertamina (Persero) Integrated Terminal Cilacap

***Abstract***

*The number of workers in the formal or informal sector is still dominated by men. One of the reasons is the discovery of patriarchal culture in several fields of life. The role of the government, non-governmental institutions as well as the private sector in breaking the chain needs to be done. So how is the synergy of stakeholders to get help through Sumber Patedhan RW 01 dan 03 Women's Farmers Group in Lomanis Cilacap Village? This research uses descriptive qualitative with data collection techniques using interviews and documentation. This research concludes that the CSR Program conducted by PT Pertamina Integrated Terminal Cilacap is included in the Corporate Citizenship category. This Program Has Cause Programs That The Company Has Done Tackling Society And Sustainability. Synergy stakeholders have also participated in this program. although there are a few notes.*

**Keywords:** *Corporate Social Responsibility, Women's Empowerment, Women Farmers' Groups, Welfare, Stakeholders.*

**Abstrak**

Jumlah tenaga kerja bidang formal maupun informal masih di dominasi oleh laki-laki. Salah satu penyebabnya adalah masih ditemukannya budaya patriarki yang dalam beberapa bidang kehidupan. Peran pemerintah, lembaga non pemerintah maupun swasta dalam memutus mata rantai tersebut perlu dilakukan. Maka bagaimana sinergi stakeholder untuk kesejahteraan melalui Kelompok Wanita Tani Sumber Patedhan RW 01 dan 03 yang berada di Kelurahan Lomanis Cilacap?. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan tehnik pengambilan datanya menggunakan wawancara dan



dokumentasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Program CSR yang dilakukan oleh PT Pertamina Integrated Terminal Cilacap termasuk dalam kategori *Corporate Citizenship*. Hal ini disebabkan program yang dilakukan perusahaan telah mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan program. Sinergi stakeholder juga telah dirasakan dalam program ini, meskipun terdapat beberapa catatan.

**Kata Kunci:** *Corporate Social Responsibility*, Pemberdayaan Perempuan, Kelompok Wanita Tani, Kesejahteraan, Stakeholder.

## A. PENDAHULUAN

Saat ini, kemiskinan masih menjadi isu yang hangat diperbincangkan. Tidak hanya di dalam negeri, kemiskinan masih menjadi topik yang sering diperbincangkan di lingkup internasional.<sup>1</sup> Permasalahan ini menjadi penting untuk segera diselesaikan karena menyangkut persoalan manusia dan kemanusiaan. Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat dan minimnya peluang kerja merupakan faktor salah satu dari berbagai penyebab tingginya angka kemiskinan.

Minimnya peluang kerja bagi masyarakat, merupakan faktor yang paling dominan. Dunia kerja terbagi menjadi dua, yakni sektor formal dan sektor informal. Keberadaan sektor formal hingga saat ini masih menjadi *wahana bersaing* untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Ketatnya persyaratan dalam memasuki sektor formal, memungkinkan masyarakat sulit untuk terserap di sektor ini. Terlebih bagi kaum perempuan, minimnya pendidikan dan keterampilan yang dimiliki, merupakan resistensi untuk memasuki dunia kerja sektor formal. Masih rendahnya tingkat pendidikan perempuan ditandai dengan presentase jumlah pekerja perempuan dengan usia 15 tahun ke atas yang berada di perdesaan menunjukkan bahwa 43,43 % maksimum lulusan SD. Sementara itu, di perkotaan tingkat lulusan perempuan lebih tinggi, yakni pada jenjang SMA dengan presentase 53,63 %.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Bayu Mitra A. Kusuma dan Theresia Octastefani, "Melawan Budaya Kemiskinan: Strategi Implementasi Perda Penanganan Gempeng di Daerah Istimewa Yogyakarta," *WELFARE: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 7.1 (2018), hal. 14 <<https://doi.org/10.14421/welfare.2018.071-02>>.

<sup>2</sup>Gaib Hakiki et al., *Profil Perempuan Indonesia 2019*, ed. oleh Nur Sahrizal et al. (Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2019), hal. 47.

Meskipun pada tingkat ekonomi makro, menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu persen kepesertaan perempuan dalam dunia pendidikan sekolah menengah menghasilkan 0,3 persen pendapatan per kapita.<sup>3</sup> Namun, hal tersebut tidak sejalan dengan kondisi yang ada saat ini. Masih banyak perempuan berpendidikan yang belum terserap di sektor formal.

Badan Pusat Statistik (BPS) melalui Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) tahun 2019, menyebutkan bahwa di Indonesia jumlah tenaga kerja yang menduduki sektor formal sebanyak 44,28% dengan pembagian pekerja laki-laki sebanyak 65,80% dan perempuan sebanyak 34,20%. Sementara itu, presentase pekerja di sektor informal sebanyak 56,72%, dengan 58,03% terdiri dari laki-laki dan 41,97% perempuan.<sup>4</sup> Berdasarkan data di atas, terlihat bahwa jumlah penduduk yang bekerja di sektor formal lebih sedikit dibandingkan dengan penduduk yang bekerja di sektor informal.

Minimnya jumlah perempuan yang bekerja di sektor formal merupakan salah satu dampak dari budaya yang dianggap sebagai dosa di masa lalu, yakni budaya patriarkhi. Potret budaya patriarkhi masih terlihat nyata, ditandai dengan adanya eksklusi sosial yang menghalangi perempuan untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi, sosial, dan politik di masyarakat secara utuh.<sup>5</sup> Sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, menyebabkan laki-laki memiliki otoritas yang lebih luas dibandingkan perempuan. Hal ini lah yang menyebabkan kaum perempuan selalu termarginalkan. Sistem patriarkhi yang mendominasi kehidupan masyarakat menyebabkan adanya kesenjangan dan ketidakadilan gender dalam berbagai aspek. Perempuan menempati posisi kedua, sehingga akses terhadap wilayah ekonomi, sosial, politik dan aspek lainnya pun terbatas.

Salah satu bentuk budaya patriarkhi yang masih berkembang di dunia kerja adalah minimnya jaminan perlindungan tenaga kerja bagi perempuan. Tidak terdapat tunjangan, upah murah, hingga tidak adanya upah lembur bagi

---

<sup>3</sup>Edriana Noerdin et al., *Potret Kemiskinan Perempuan* (Jakarta: Women Research Institute, 2006), hal. 4.

<sup>4</sup>BPS, *Survei Angkatan Kerja Nasional*, BPS RI/BPS-Statistic Indonesia (Jakarta: CV. Ramsi Sinar Sejahtera, 2019).

<sup>5</sup>Waston Malau, "Pengaruhutamaan Gender dalam Program Pembangunan," *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 6.2 (2014), 125–31 (hal. 127) <<https://doi.org/https://doi.org/10.24114/jupiiis.v6i2.2292>>.

perempuan merupakan bentuk kesenjangan di dunia kerja. Selain itu, belum terdapat jaminan keamanan dan kenyamanan bagi perempuan untuk beraktivitas di ruang publik. Komnas Perempuan mencatat angka tindak kekerasan perempuan di ruang publik pada tahun 2018 sebanyak 3.915 kasus.<sup>6</sup>

Pada beberapa kasus bahkan angka kemiskinan pada perempuan dapat berakibat pada kekerasan pada perempuan.<sup>7</sup> Maka perlu ada sinergi berbagai pihak baik pemerintahan, lembaga sosial non pemerintah (NGO),<sup>8</sup> dan swasta<sup>9</sup> untuk bersama-sama mencari alternatif penanggulangan kemiskinan perempuan. Pemerintah dengan berbagai upaya telah berusaha untuk menuntaskan persoalan tersebut. Selain mengencangkan program-program penanggulangan kemiskinan, pemerintah mencetuskan program perlindungan sosial yang di dalamnya terdapat unsur pemberdayaan perempuan, seperti Program Keluarga Harapan. Meskipun program tersebut tidak secara khusus diarahkan untuk pemberdayaan perempuan.<sup>10</sup> Di sisi lain, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, memiliki program yang berupa Kabupaten/Kota Layak Anak, Jelajah 3Ends, Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), dan Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA). Program tersebut merupakan program yang secara khusus ditujukan untuk pemberdayaan perempuan dan anak.

Sementara itu, pihak swasta pun memiliki keterlibatan yang cukup besar dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Perusahaan harus memiliki tanggung jawab sosial. Hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40

---

<sup>6</sup>Dwi Hadya Jayani, "Angka Kekerasan terhadap Perempuan Cenderung Meningkat," katadata.co.id, 2019 <<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/09/17/angka-kekerasan-terhadap-perempuan-cenderung-meningkat>> [diakses 27 Mei 2020].

<sup>7</sup>Istiqomah, "ARAL TERJAL MENGHADANG PEREMPUAN: Studi Pencegahan Kekerasan Bagi Perempuan Oleh LSM Rifka Annisa di Ngalang, Gunungkidul," *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran dan Dakwah Pembangunan*, 1.1 (2017), hal. 163 <<https://doi.org/10.14421/jpm.2017.011-08>>.

<sup>8</sup>Susilawati, "Pemberdayaan Perempuan di 'Kampung Damai': Studi Pendampingan Komunitas oleh Wahid Foundation di Gemlengan Klaten," *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran dan Dakwah Pembangunan*, 2.2 (2019), 411–32 (hal. 416) <<https://doi.org/10.14421/jpm.2018.022-10>>.

<sup>9</sup>Beni Hanifah Pinesti, "Pemberdayaa Perempuan Korban Gempa Bumi Melalui Program Kredit Mikro Koperasi Syaria'ah Gema di Dusun Miri Sewon Bantul," *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran dan Dakwah Pembangunan*, 2.2 (2019), 293–318 (hal. 299) <<https://doi.org/10.14421/jpm.2018.022-05>>.

<sup>10</sup>Muhammad Syukri, "Pemberdayaan Perempuan dalam Program Penanggulangan Kemiskinan: Seberapa Efektifkah dalam Meningkatkan Kesetaraan Gender?," *The SEMERU Research Institute* (Jakarta, 2013), hal. 1–10 (hal. 4).

Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 74 ayat (1) yang mewajibkan perusahaan agar melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Salah satunya adalah CSR PT Pertamina (Persero) Integrated Terminal Cilacap yang mengembangkan program Kelompok Wanita Tani.

Program Kelompok Wanita Tani Sumber Patedhan RW 01 dan 03 yang dikembangkan oleh PT Pertamina (Persero) Integrated Terminal Cilacap berlokasi di RW 01 dan 03 Kelurahan Lomanis, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Kelurahan Lomanis memiliki luas wilayah 287.543 km<sup>2</sup>, yang terdiri dari 22 RT dan 6 RW dengan jumlah penduduk usia 1-60 tahun sebanyak 2.917. Sebanyak 1073 merupakan ibu rumah tangga dan 956 jiwa lainnya masih usia sekolah. Daerah tersebut merupakan wilayah ring satu perusahaan. Program Kelompok Wanita Tani sudah berjalan mulai tahun 2017. Program ini bergerak pada bidang pemberdayaan perempuan melalui Kelompok Wanita Tani dengan jumlah anggota kurang lebih sebanyak 67 orang.<sup>11</sup>

Didampingi oleh CSR PT Pertamina (Persero) Integrated Terminal Cilacap, Kelompok Wanita Tani Sumber Patedhan RW 01 dan 03 melaksanakan berbagai kegiatan pemberdayaan berupa pelatihan kepada perempuan. Pelatihan yang dilakukan meliputi pelatihan kelembagaan, pelatihan pembibitan sayuran, pelatihan pembibitan tanaman hidroponik dan vertikultur. Selain itu CSR PT Pertamina (Persero) Integrated Terminal Cilacap memberikan bantuan alat pertanian dan pembangunan rumah bibit. Juga terdapat stakeholder setempat yang ikut mendukung pelaksanaan program pemberdayaan. Sehingga Kelompok Wanita Tani menjadi program andalan sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berada di Kelurahan Lomanis, Cilacap.

Masifnya program yang dilaksanakan serta antusias masyarakat dan stakeholder setempat yang cukup baik, terlebih kelompok perempuan dalam program ini, menjadi suatu kajian penelitian yang cukup menarik. Maka muncul pertanyaan dalam penelitian ini, yaitu: Bagaimana Sinergi Stakeholder dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat melalui Kelompok Wanita Tani (KWT) Sumber Patedhan RW 01 dan 03?.

---

<sup>11</sup>Laporan Program Kelompok Wanita Tani (KWT) Sumber Pathedan RW 01 dan 03, Lomanis Cilacap PKPU Human Initiavite Jawa Tengah tahun 2018, pp. 6–8.

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana bentuk sinergi stakeholder dalam mewujudkan kesejahteraan Kelompok Wanita Tani Sumber Patedhan RW 01 dan 03 di Kelurahan Lomanis melalui program yang dilaksanakan oleh CSR PT.Pertamina (Persero) Integreted Cilacap. Sehingga diperlukan tinjauan terhadap penelitian terdahulu, untuk melihat perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Haryati dengan fokus penelitan sinergi stakeholder dalam mewujudkan aktivitas pariwisata di Desa Wisata Baha, Mengwi, Bandung. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa masing-masing stakeholder memiliki peran yang berbeda dalam menunjang pelaksanaan desa wisata. Dalam hal ini stakeholder yang dimaksud adalah pemerintah (Dinas Pariwisata Kabupaten Bandung dan Desa Dinas Baha), pelaku usaha pariwisata (masyarakat lokal yang menyewakan rumahnya menjadi homestay) dan masyarakat lokal yang bertanggungjawab atas terlaksananya program pariwisata. Sinergi stakeholder di Desa Wisata Baha belum terdapat persepsi yang sama, meskipun masing-masing stakeholder memiliki kontribusi terhadap stakeholder lainnya, sehingga masing-masing tujuan dari stakeholder belum bisa tercapai. Partisipasi masyarakat lokal pun masih minim dalam mengikuti program desa wisata.<sup>12</sup>

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Junaid tentang model sinergi unsur pentahelix pariwisata dalam pengelolaan destinasi wisata kota Parepare, Kabupaten Bone. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sinergi pentahelix pariwisata sudah terbangun, meskipun program kerja pariwisata masih didominasi oleh pemerintah daerah. Keterlibatan pentahelix pariwisata dibutuhkan untuk mendukung perkembangan pariwisata. Kurangnya pemahaman tentang teknologi dan pariwisata oleh beberapa pentahelix, minimnya upaya peningkatan kreatifitas dan inovasi, serta adanya implementasi otonomi daerah, merupakan tantangan dalam pengelolaan wisata ini.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup>Lena Haryanti dan Saptono Nugroho, "Sinergi Stakeholder dalam Mewujudkan Aktivitas Pariwisata di Desa Wisata Baha, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Bandung," *Jurnal Destinasi Pariwisata*, 5.2 (2018), 195–205 (hal. 204).

<sup>13</sup>Ilham Junaid, "Model Sinergi Unsur Pentaheliks Pariwisata dalam Pengelolaan Destinasi Wisata Kota Parepare dan Kabupaten Bone," *Sosiohumaniora*, 21.1 (2019), 22–33 <<https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v21i1.17016>>.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Aditya dengan fokus penelitian mengenai analisis penta helix dalam melihat keberlanjutan program CSR Patratura tahun 2017 di PT Pertamina RU III Plaju. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan membutuhkan beberapa perbaikan agar program dapat berjalan dengan baik. Peran perusahaan sebagai inisiator dan pemerintah sebagai pendukung kegiatan sudah berjalan dengan baik. Namun, peran akademisi sebagai konseptor, komunitas sebagai jaring pengaman keberlanjutan program, serta media sebagai katalisator perlu diperhatikan.<sup>14</sup>

Dari berbagai penelitian yang sudah dilakukan, menunjukkan bahwa stakeholder memiliki peran penting dalam merealisasikan program atau tujuan demi tercapainya kesejahteraan. Sehingga adanya sinergi menjadi penting untuk memperkuat peran masing-masing stakeholder. Menurut Jamal dan Gertz, sebagaimana yang dikutip oleh Junadi, sinergi atau sinergitas keduanya memiliki makna yang sama, yakni keterpaduan beberapa unsur yang apabila disatukan akan menghasilkan sesuatu yang bernilai positif. Sinergi juga berkaitan dengan istilah kemitraan dan kolaborasi sebagai wadah untuk mencapai suatu tujuan.<sup>15</sup> Keberadaan sinergi memungkinkan terjadinya kerjasama yang baik antar komponen yang berada di lingkaran sinergi tersebut.

Stakeholder adalah pemangku kepentingan yang berada di suatu masyarakat. Menurut Hertifah, sebagaimana yang dikutip oleh Mahfud, menyebutkan bahwa stakeholder terdiri dari individu, kelompok baik laki-laki maupun perempuan yang memiliki kepentingan yang dipengaruhi dan terlibat dalam suatu kegiatan program pembangunan.<sup>16</sup> Komponen stakeholder bisa terdiri dari pemerintah, masyarakat, lembaga masyarakat non pemerintah/ Lembaga Swadaya Masyarakat (NGO), komunitas, akademisi, dan media. Pada penelitian ini, swasta memiliki peran yang besar dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain bertujuan untuk mendapatkan keuntungan (profit), perusahaan memiliki tanggung jawab untuk memperhatikan

---

<sup>14</sup>Rahadiyand Aditya, "Analisis Penta Helix dalam Melihat Keberlanjutan Program CSR Patratura pada Tahun 2017," *Empower: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 4.2 (2019), 149 <<https://doi.org/10.24235/empower.v4i2.5320>>.

<sup>15</sup>D. Jamal, T. & Getz, *Collaboration Theory and Community Tourism Planning* (Annals of Tourism Research, 1995), xxii, hal. 186–204.

<sup>16</sup>Hertifah S. J Sumarto, *Inovasi, Partisipasi dan Good Governance : 20 Prakarsa Inovatif dan Partisipatif Di Indonesia* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003), hal. 29.



keberlanjutan lingkungan sosial, yaitu kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan merupakan kondisi di mana seseorang berada dalam keadaan makmur, aman, selamat dan terbebas dari berbagai bentuk ancaman. Hal ini menjadi tujuan yang harus dilaksanakan bersama. Dalam hal ini diperlukan sinergi stakeholder, yakni bagaimana stakeholder yang ada dapat berperan sesuai dengan kompetensi dan fokus bidang masing-masing, namun tetap dalam satu tujuan yang sama.

Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan terbatas, tepatnya dalam bab IV Pasal 74 Ayat 2 menyatakan bahwa perusahaan wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Sejalan dengan pernyataan tersebut, perusahaan memiliki komitmen untuk melaksanakan tanggung jawab sosial di lingkungan perusahaan yang didirikan. Bentuk komitmen perusahaan untuk melakukan tanggung jawab sosial disebut dengan Corporate Social Responsibility (CSR). Dalam hal ini, perusahaan memiliki kewajiban untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menjalankan bisnis dengan baik dan turut andil dalam sumbangsih sumber daya yang dibutuhkan masyarakat.

Sebelumnya, perusahaan hanya berorientasi pada profit atau keuntungan, namun saat ini sudah bertransformasi menjadi perusahaan yang berpegang pada prinsip triple buttom line. Pelaksanaan CSR mengacu pada prinsip triple bottom line, yakni berorientasi pada profit (keuntungan), people (orang), planet (bumi dan lingkungan sekitar). Profit, dalam hal ini perusahaan harus memiliki oreintasi keuntungan secara ekonomi. Dengan adanya keuntungan ekonomi, akan menarik para investor untuk menanamkan modal di perusahaan tersebut. People, perusahaan memiliki tanggungjawab untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan dan masyarakat sekitar. Keuntungan yang diperoleh perusahaan tidak serta merta dimanfaatkan secara pribadi, melainkan untuk kesejahteraan bersama agar tidak terjadi kesenjangan sosial di lingkungan perusahaan. Selain beorientasi pada keuntungan secara ekonomi serta kesejahteraan karyawan dan masyarakat, perusahaan harus

memperhatikan lingkungan (planet). Lingkungan yang baik, akan mendorong keberlanjutan perusahaan tersebut.<sup>17</sup>

Perusahaan memiliki tingkatan CSR yang berbeda-beda.<sup>18</sup> Corporate Charity merupakan CSR yang melaksanakan kepedulian sosial dalam bentuk amal. Dampak dari aktivitas ini belum bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat maupun perusahaan, meskipun pada pelaksanaannya menghabiskan biaya yang cukup besar. Sehingga CSR pada tingkatan ini jarang digunakan. *Corporate Philanthropy* merupakan CSR yang dilakukan perusahaan berdasarkan nilai dasar kemanusiaan. Tujuan dari CSR ini guna memberikan sebagian keuntungan yang diperoleh perusahaan untuk diberikan kepada masyarakat sekitar sebagai wujud kepedulian terhadap sesama. Hal ini sebagai tanggung jawab moral di mana perusahaan telah mengambil dan memanfaatkan sumber daya yang ada. Selanjutnya terdapat *Corporate Citizenship*, yakni program CSR yang didasari oleh motif kewargaan dengan tujuan mencapai kemakmuran bersama. Pada tingkatan ini, kegiatan CSR dirancang untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan mengedepankan asas keberlanjutan. Salah satu bentuk CSR yang saat ini masif dikembangkan di lingkungan perusahaan adalah pengembangan masyarakat atau *community development* sebagai upaya untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri dan berdaya. Program pengembangan masyarakat merupakan program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik dalam bidang ekonomi, pendidikan, lingkungan, sosial dan ekonomi.

*Community development* yang dilaksanakan oleh perusahaan mengedepankan prinsip-prinsip pemberdayaan, yakni *empowerment*, *sustainability* (keberlanjutan) dan partisipasi. Artinya, pengembangan masyarakat mengarah pada pemberdayaan, program yang dilaksanakan pun berkelanjutan, dan mengedepankan partisipasi masyarakat dan stakeholder setempat.

Berbagai program CSR yang dilakukan oleh perusahaan, tentu tidak dapat berjalan sendiri. Diperlukan sinergi dan kerjasama antar stakeholder yang

---

<sup>17</sup>J. Elkington, *Cannibals with Forks: The Triple Bottom Line of 21st Century Business* (Oxford: Capston, 1997).

<sup>18</sup>Abidin H et al., *Sumbangan Sosial Perusahaan* (Jakarta: Pustaka, 2003).

terdapat di lingkungan perusahaan. Dalam hal ini dibutuhkan analisis Penta helix, atau yang sering dikenal dengan ABCGM yakni sinergi antara akademisi, bisnis, komunitas, pemerintah dan media. Penta helix merupakan bentuk kerjasama yang dilakukan oleh komponen-komponen seperti yang telah disebutkan di atas. Akademisi berperan sebagai konseptor, dalam hal ini berperan untuk mengidentifikasi potensi dan sumber daya manusia. Kedua, sektor swasta atau perusahaan berperan sebagai *enabler*. Perusahaan dapat menghadirkan infrastruktur dan modal, sehingga dapat membantu pengembangan potensi desa menjadi lebih efektif dan efisien.<sup>19</sup>

*Community* atau komunitas berperan sebagai akselerator. Komunitas merupakan kumpulan orang-orang yang memiliki minat dan yang sama dan sejalan dengan potensi yang akan dikembangkan. Potensi yang dimiliki merupakan aset yang dapat menunjang program pemberdayaan masyarakat. Pemerintah, berperan sebagai regulator dan kontroler yakni terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pengambilan keputusan, pengeluaran kebijakan, dan pengendalian.<sup>20</sup> Selain itu, pemerintah juga berperan untuk menghubungkan para pemangku kepentingan yang berkontribusi dalam pengembangan potensi desa. Terakhir, media memiliki peran sebagai expender, artinya media berperan dalam publikasi dan promosi. Media merupakan sarana untuk menyampaikan informasi terkait program yang dilaksanakan di suatu masyarakat.

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk menjelaskan fenomena yang terjadi di masyarakat, dengan mengumpulkan data secara lengkap dan mendalam. Sehingga diperoleh informasi yang lebih akurat.<sup>21</sup> Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Lomanis, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Subjek penelitian merupakan orang yang paham terhadap apa yang diteliti. Untuk memilih subjek yang baik, terdapat beberapa syarat, yakni orang yang diteliti terlibat langsung,

---

<sup>19</sup>Novy Setya Yunus, "Implementasi Konsep Penta Helix dalam Pengembangan Potensi Desa melalui Model Lumbung Ekonomi Desa di Jawa Timur," *Jurnal Inovasi Kebijakan*, 2019, 37–46 (hal. 45) <<https://doi.org/10.21787/mp.3.1.2019.37-46>>.

<sup>20</sup>Yusuf, hal. 45.

<sup>21</sup>Lexy J Moeloeng, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rosda, 2010).

cukup lama terlibat dalam kegiatan yang akan diteliti, dan memiliki waktu yang cukup untuk dimintai informasi. Adapun informan dalam penelitian ini adalah Rinaldy sebagai *Community Developer Officer* (CDO) di PT Pertamina (Persero) Integrated Terminal Cilacap dan Riswati sebagai penerima manfaat program. Objek penelitian yang diteliti adalah kegiatan Kelompok Wanita Tani Sumber Patedhan RW 01 dan 03 dan bentuk sinergi stakeholder program CSR.

Dalam penelitian ini instrumen pengumpulan data melalui wawancara, dan dokumentasi. Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara secara terbuka terstruktur. Artinya, peneliti melakukan kegiatan wawancara secara terang-terangan kepada informan, namun tetap dalam pembahasan yang telah ditentukan oleh peneliti. Selanjutnya dilakukan lacak dokumen, yakni dengan menelaah beberapa laporan program KWT yang telah dilaksanakan sebelumnya. Sementara itu, untuk menguji keabsahan data, peneliti menggunakan teknik triangulasi, yakni membandingkan hasil wawancara informan satu dengan informan lainnya. Sehingga dapat ditarik kesimpulan yang tepat.

### C. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### a. Kelompok Wanita Tani Sumber Patedhan *Reborn*

Kelurahan Lomanis terletak di Kecamatan Cilacap Tengah. Memiliki luas wilayah sebesar 3.619 m<sup>2</sup> dan jumlah penduduk sebesar 5.094 dengan pembagian 2.560 jiwa penduduk laki-laki dan 2.534 jiwa penduduk perempuan. Terdapat beberapa kegiatan pemberdayaan masyarakat yang sudah ada di kelurahan ini baik dari pemerintah, perusahaan maupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).<sup>22</sup>

Salah satu program yang dilakukan oleh pemerintah melalui PKK Kelurahan Lomanis adalah program pemberdayaan melalui Kelompok Wanita Tani. Kegiatan kelompok ini adalah bercocok tanam sayuran untuk pemenuhan kebutuhan keluarga. Tujuannya adalah terciptanya warung hidup di wilayah kelurahan.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup>Sodec, *Laporan Socail Mapping di Wilayah Pengembangan Masyarakat PT Pertamina LPG Cilacap*, Social Development Studies Center (SODEC) (Yogyakarta, 2017), hal. 62.

<sup>23</sup>Sodec, hal. 81.

Kelompok Wanita Tani sudah ada sejak tahun 2013, namun program ini belum bisa berjalan dengan baik dan sempat mengalami kemandekan (*vacum*). Banyak faktor yang menyebabkan kegiatan positif ini hidup segan matipun tak mau.

Pada tahun 2017, PT Pertamina (Persero) Integrated Terminal Cilacap yang saat itu masih bernama Depot LPG Cilacap menggandeng Universitas Gadjah Mada (UGM) pada kegiatan *social mapping*. Hasil dari *social mapping* menyebutkan bahwa program prioritas pertama yang harus dilakukan adalah Pembinaan Kelompok Wanita Tani yang berada di wilayah RW 01 dan 03 Kelurahan Lomanis. Beberapa pertimbangan yang menyebabkan program ini menjadi prioritas adalah dapat meningkatkan penghasilan, keterampilan, menyerap tenaga kerja perempuan di wilayah Kelurahan Lomanis dan dapat meningkatkan mutu hasil pertanian dan daya jual sayuran<sup>24</sup>.

Berdasarkan hasil analisis dalam laporan *social mapping* menunjukkan bahwa program ini layak untuk dijadikan prioritas awal. Pertama dapat menjawab masalah sosial personal, karena terdapat banyak perempuan di wilayah ini bermata pencaharian sebagai ibu rumah tangga. Kedua, memanfaatkan potensi sumber daya alam berupa lahan bengkok (tanah kas desa) yang dapat dimanfaatkan dan jaringan dengan pasar guna menampung hasil pertanian. Ketiga menciptakan dampak positif yang luas berupa peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam mengelola tanaman dan meningkatkan pendapatan keluarga.<sup>25</sup>

Kelompok Wanita Tani yang berada di wilayah Kelurahan Lomanis ini memiliki nama Kelompok Wanita Tani Sumber Patedhan RW 01 dan 03 dengan fokus kegiatan pemberdayaan perempuan di Kelurahan Lomanis, Kecamatan Cilacap Tengah. KWT ini terdiri dari 67 anggota dengan didampingi oleh CSR PT Pertamina (Persero) Integrated Terminal Cilacap. Program yang dilaksanakan terdiri dari: penguatan kelembagaan, pelatihan budidaya sayuran hidroponik dan vertikultur, pelatihan pembibitan, olahan

---

<sup>24</sup>Sodec, hal. 536.

<sup>25</sup>Sodec, hal. 546.

produk (*home industry*), pendirian rumah bibit, dan supporting alat pertanian.

Rencana program yang dilakukan oleh CSR PT Pertamina (Persero) Integrated Terminal Cilacap terbagi menjadi dua, yakni rencana program jangka pendek dan jangka panjang. Rencana program jangka pendek yang dilakukan perusahaan berupa monitoring program pemberdayaan masyarakat dan pengembangan produk olahan. Sementara itu, rencana program jangka panjang meliputi pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui sentra pertanian modern guna mewujudkan ketahanan pangan. Dalam hal ini, di Kelurahan Lomanis terdapat kegiatannya yang berupa penguatan kapasitas (*capacity building*), produksi dan pemasaran produk olahan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Putra bahwa program ini terbagi menjadi dua yaitu program jangka pendek dan jangka panjang:

*“..Rencana jangka pendeknya yaitu monitoring program pemberdayaan masyarakat dan pengembangan produk olahan. Adapun rencana jangka panjangnya yakni pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui sentra pertanian modern yang mewujudkan ketahanan pangan masyarakat. Adapun dalam hal ini yakni adanya rumah berdaya di lomanis yang mana lingkupnya Kelurahan Lomanis dengan kegiatannya berupa penguatan kapasitas, produksi dan pemasaran produk olahan..”<sup>26</sup>*

Pada dasarnya program yang dilaksanakan oleh CSR PT Pertamina (Persero) Integrated Terminal Cilacap bertujuan untuk membangun kesadaran masyarakat terkait potensi yang ada. Hal ini terlihat dalam program pelatihan hidroponik dan vertikultur, untuk memanfaatkan lingkungan sekitar tempat tinggal sebagai lokasi bercocok tanam. Selain itu, adanya pelatihan produk olahan tani bertujuan menggali potensi masyarakat guna mengembangkan produk olahan. Hal ini menjadi nilai tambah bagi pemberdayaan ekonomi masyarakat.

#### **b. Kelompok Wanita Tani Sumber Patedhan RW 01 dan 03 Memberdayakan Perempuan Mensejahterakan Rakyat**

---

<sup>26</sup>Wawancara dengan M. R. Putra, 21/05/2020.

*Social mapping* yang dilakukan PT Pertamina (Persero) Integrated Terminal Cilacap bekerjasama dengan UGM merupakan awal mula bangkitnya program Kelompok Wanita Tani Sumber Patedhan RW 01 dan 03 di Kelurahan Lomanis, setelah beberapa tahun terakhir mengalami penurunan aktivitas. Pada tahun 2017 saat dilaksanakannya *social mapping*, terdapat kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) yang diikuti oleh masyarakat Kelurahan Lomanis. Pelaksanaan FGD ini dibagi menjadi 2 tahapan, yaitu FGD yang diikuti oleh bapak-bapak dan ibu-ibu. Masing-masing informan (peserta diskusi) mengikuti kegiatan ini dalam waktu dan tempat yang berbeda. Melalui forum ini, masyarakat dapat mengemukakan ide dan gagasannya terkait program yang akan dilaksanakan. Setelah disimpulkan maka, Pembinaan Kelompok wanita Tani Sumber Pathe dan menjadi prioritas utama program yang perlu diperhatikan.

PT Pertamina (Persero) Integrated Terminal Cilacap dalam mengimplementasikan programnya menggandeng Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU)-Human Initiative. PKPU-HI berperan dalam mengkonsep program, melakukan audiensi baik kepada Dinas Ketahanan Pangan dan Pemerintah Kelurahan Lomanis. Selanjutnya, PKPU-HI berdiskusi dengan ketua RW dan pihak-pihak yang berperan aktif di lingkungan tersebut. Pada tahap ini masukan atau input yang diberikan oleh pihak terkait, dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan program. Secara efektif, kerjasama dengan PKPU-HI sudah dilakukan sejak tahun 2018 dan 2019, untuk tahun 2020 perusahaan masih mengkaji kerjasama tersebut karena beberapa alasan.<sup>27</sup>

Terdapat beberapa tahapan implementasi program yang dilakukan oleh CSR PT Pertamina (Persero) Integrated Terminal Cilacap dalam mengakomodir rekomendasi program hasil *social mapping*. Pada tahun 2018 bentuk kegiatan yang dilakukan dalam program ini adalah melakukan pembekalan fasilitator, audiensi stakeholder, *rembuk* warga, pelatihan kelembagaan, perencanaan, dan *launching* program Kelompok

---

<sup>27</sup>Wawancara dengan M. R. Putra, 21/05/2020.

Wanita Tani.<sup>28</sup> Dokumen laporan program tersebut sejalan dengan pernyataan Putra sebagai perwakilan perusahaan yang menyatakan bahwa “..Bantuan yang diberikan pada tahun 2018 berupa Rumah Bibit, Peralatan pertanian, kebutuhan pertanian dan penguatan kapasitas anggota kelompok.”<sup>29</sup> Tahap awal yang dilakukan adalah pelatihan dan pembekalan fasilitator. Dalam pelatihan ini disampaikan materi-materi terkait pemberdayaan masyarakat dan teknik fasilitasi bagi masyarakat.

Sejak tahun 2018 sudah terdapat 6 kali pelatihan yang fokus pada peningkatan keterampilan pertanian dan *homeindustry*. Selain program yang berbentuk pelatihan dan pemberdayaan, terdapat program yang berupa bantuan alat-alat dan bahan pertanian yang diberikan kepada Kelompok Wanita Tani.

Pada tahun 2019 terdapat beberapa kegiatan dilakukan oleh perusahaan yakni pelatihan drip irigasi, pengolahan dan pelatihan packing (pengemasan) produk. Pelatihan pembuatan drip irigasi dilakukan di posyandu Mustikarini III. Tujuan diadakannya pelatihan ini untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada anggota KWT. Drip irigasi berfungsi sebagai media penunjang dalam perawatan tanaman, yakni memberikan kemudahan bagi anggota untuk melakukan penyiraman di saat musim kemarau. Sementara itu, melalui pelatihan dan pengolahan produk, yang berupa olahan kripik bayam dan sambal ikan asin, anggota diharapkan memiliki kemandirian dan keterampilan sehingga dapat menunjang bertambahnya penghasilan dari kegiatan KWT. Pelatihan yang dilakukan di tahap selanjutnya adalah pelatihan pengemasan produk olahan. Pengemasan merupakan salah satu strategi untuk meningkatkan daya tarik konsumen. Pengemasan juga bertujuan untuk mengawetkan produk olahan sehingga dapat disimpan dalam jangka panjang.<sup>30</sup> Secara sederhana kegiatan pada tahun 2019 diringkas menjadi 3 yaitu penguatan kapasitas anggota kelompok, pengadaan media *hydroponic* dan vertikultur

---

<sup>28</sup>PKPU-HI, *Laporan Program Kelompok Wanita Tani Sumber Patedhan RW 01 & 03 Lomanis Cilacap 2018* (Semarang, 2018), hal. 4.

<sup>29</sup>Wawancara dengan M. R. Putra, 21/05/2020.

<sup>30</sup>PKPU-HI, *Laporan Program Kelompok Wanita Tani Sumber Patedhan RW 01 & 03 Lomanis Cilacap 2018*, hal. 3.



dan pengadaan kebutuhan pertanian dan *home industry*.<sup>31</sup> Hingga tahun 2019 kegiatan yang dilakukan masih bekerjasama dengan PKPU-HI.<sup>32</sup>

Pada tahun 2020, perusahaan melakukan beberapa analisis dalam melaksanakan kegiatan. Selain itu, kondisi Pandemi Covid-19 yang sedang dihadapi oleh dunia menyebabkan beberapa kegiatan sedikit terganggu. Perusahaan sedang mempertimbangkan skema terbaik dalam menjalankan program ini.

Secara teori implementasi program CSR memiliki tiga tingkatan yaitu Corporate Charity, Corporate Philanthropy dan Corporate Citizenship. Menurut penulis tingkatan CSR yang dilakukan oleh PT Pertamina (Persero) Integrated Terminal Cilacap adalah Corporate Citizenship, Mengapa demikian?. Pertama, secara konsep Corporate Citizenship adalah sebuah program tanggung jawab sosial yang didasari oleh motif kewargaan dengan tujuan mencapai kemakmuran bersama. Program pemberdayaan melalui KWT Sumber Patedhan RW 01 dan 03 ini melibatkan masyarakat khususnya kaum perempuan, yang mana KWT sebagai wadah dalam menciptakan kemakmuran bersama. *Kedua*, kegiatan CSR dirancang untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan mengedepankan asas keberlanjutan. Kegiatan pada KWT Sumber Patedhan RW 01 dan 03 diawali dengan pemetaan sosial di wilayah dengan memanfaatkan potensi sehingga dapat meningkatkan kemandirian masyarakat. Selain itu, kegiatan ini juga dilakukan berkelanjutan dengan adanya rencana jangka pendek dan rencana jangka panjang.

#### **c. Sinergi Stakeholder untuk Kesejahteraan Masyarakat melalui KWT Sumber Patedhan RW 01 dan 03**

Kesejahteraan merupakan tujuan bersama. Salah satu cara yang dapat ditempuh untuk mengembangkan SDM adalah pemberdayaan masyarakat melalui potensi yang sudah ada. Hal ini penting untuk dilakukan, mengingat kualitas sumber daya manusia yang masih rendah, namun sumber daya alam berlimpah. Kedua kondisi ini akan menjadi solusi apabila mampu diorganisir dengan baik. Salah satu upaya untuk

---

<sup>31</sup>Wawancara dengan M. R. Putra, 21/05/2020.

<sup>32</sup>PKPU-HI, *Laporan Program Kelompok Wanita Tani Sumber Pathedan Lomanis Cilacap 2019* (Semarang, 2019).

meningkatkan kualitas SDM dapat dilakukan melalui pemberdayaan perempuan. Upaya ini menjadi *jurus jitu* yang langsung menasar pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, terlebih pada kaum perempuan. Salah satu program yang menjadi wadah dalam upaya pemberdayaan perempuan adalah dibentuknya Kelompok Wanita Tani. Membutuhkan waktu yang cukup lama untuk merealisasikan program tersebut, sehingga dibutuhkan *sinergi* dari stakeholder yang dapat menunjang terlaksananya program tersebut.

Sinergi atau sinergitas bermakna keterpaduan beberapa unsur yang apabila disatukan akan menghasilkan sesuatu yang bernilai positif. Sedangkan Stakeholder adalah pemangku kepentingan yang berada di suatu masyarakat. Pada program pemberdayaan masyarakat melalui KWT Sumber Patedhan RW 01 dan 03 terlihat adanya keterpaduan yang menghasilkan nilai positif oleh pemangku kepentingan yang berada di sana. Pemangku kepentingan di sini memiliki peran yang berbeda satu dengan yang lain.

Keberadaan stakeholder atau pemangku kepentingan merupakan komponen yang sangat penting dalam keberhasilan program. Penelitian ini menggunakan analisis penta pelix dalam menganalisis peran setiap pemangku kepentingan. Terdapat 5 komponen stakeholder dalam analisis penta helix, biasa disingkat menjadi ABCGM, yakni Akademisi, Bisnis, Community (masyarakat internal dan eksternal), Government atau pemerintah dan Media. Masing-masing komponen memiliki tugas dan fungsi yang berbeda, dan tetapi jika saling bersinergi akan menghasilkan kinerja yang baik, terlebih dalam penguatan program pemberdayaan.

Peran pertama adalah akademisi. PT Pertamina(Persero) Intergreted Terminal Cilacap melibatakan *Akademisi*, yaitu Universitas Gadjah Mada (UGM). Peran akademisi pada program ini adalah melakukan kegiatan *social mapping* pada tahun 2017 untuk memberikan rekomendasi program. Selain itu, proses *social mapping* ini menggunakan *Sustainable Livelihood Approach (SLA)* sebagai pendekatan dalam penyusunan dokumen.<sup>33</sup> Secara teori peran akademisi dalam menajalankan program adalah untuk mengidentifikasi potensi dan sumber daya manusia. Sudah sesuai memang

---

<sup>33</sup>Wawancara dengan Rinaldy, 21/05/2020.

antara kondisi yang ada di lapangan dengan teori, tetapi penulis mengkritisi bahwa peran akademisi dalam program ini terbilang minim. Selain menggali potensi dan sumber daya manusia yang dituangkan kedalam hasil laporan *social mapping* seharusnya memiliki peran lebih. Akademisi dapat berperan dalam mengkonsep secara teknis program yang akan dijalankan. Pada program ini justru peneliti melihat peran *community* lebih dominan dalam mengkonsep secara teknis kegiatan yang akan dilakukan.

Peran kedua adalah *bisnis*. Secara teori peran bisnis adalah dengan menghadirkan infrastruktur dan modal yang dibutuhkan dalam menjalankan program. Tujuannya untuk dapat membantu pengembangan potensi desa menjadi lebih efektif dan efisien. Peran bisnis di sini dilakukan oleh PT Pertamina (Persero) Integreted Terminal Cilacap melalui dana CSR nya. Perusahaan mengucurkan dana untuk membiayai beberapa kegiatan antara lain: pelatihan fasilitator, pelatihan pembibitan, pelatihan budidaya sayuran hidroponik dan vertikultur, pelatihan pembuatan drip irigasi, pendirian rumah bibit, supporting alat dan bahan pertanian serta pelatihan olahan produk hasil pertanian.

Tidak hanya berhenti sampai menghadirkan infrastruktur dan modal saja, perusahaan juga menghadirkan fasilitator yang bertugas mendampingi selama pelaksanaan program. Fasilitator yang dihadirkan berasal dari tim internal maupun tim eksternal perusahaan. Tim internal adalah fasilitator lapangan atau biasa disebut dengan istilah CD (*Community Development*) *Officer* dan tim eksternal yang turut membantu pelaksanaan program adalah fasilitator PKPU-Human Intiative. Kedua tim tersebut sama-sama memiliki fungsi dan tugas masing-masing. Tim internal mendampingi program dan menjadi kepanjangan tangan perusahaan dalam mendengarkan aspirasi kelompok. Sedangkan tim eksternal mendampingi program secara teknis yang berkaitan dengan tanaman.

Melihat konsep dan keadaan dilapangan dari peran bisnis yang sudah dilakukan pada program ini, dapat dikatakan bahwa bisnis sudah menjalankan fungsinya dengan baik. Bahkan bisnis menghadirkan fasilitator pada program tersebut yang bertujuan untuk memonitoring dan memberikan saran kepada kelompok.

Peran ketiga adalah *community* atau komunitas. Berperan sebagai akselerator *community* merupakan kumpulan orang-orang yang memiliki minat yang sama dan sejalan dengan potensi yang akan dikembangkan. Peneliti membagi *community* menjadi dua bagian yaitu internal dan eksternal. Kumpulan orang-orang atau organisasi yang memiliki minat yang sama dari dalam masyarakat (internal) biasa dijumpai dengan istilah kelompok, paguyuban, dasawisma, PKK dan masih banyak lagi istilah lain. Pada program ini kumpulan orang-orang tersebut diwadahi dalam Kelompok Wanita Tani (KWT) Sumber Patedhan RW 01 dan 03. Selain menerima program masyarakat juga turut andil dalam perencanaan, yakni dengan memberikan ide-ide terkait program yang dilaksanakan. Pengurus KWT memiliki peran yang cukup dominan, yaitu mengarahkan anggotanya agar aktif berpartisipasi dalam program CSR. Ibu Riswati selaku ketua Kelompok Wanita Tani Sumber Patedhan RW 01 dan 03 Lomanis, bertugas untuk mengarahkan dan mengajak anggota dalam program KWT.<sup>34</sup>

Sedangkan kumpulan orang-orang atau organisasi eksternal di wakili oleh Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU)-*Human Initiative* (HI). Lembaga non pemerintah yang fokus pada kegiatan ekonomi, kesehatan, pendidikan dan tanggap darurat (bencana). Dalam bidang ekonomi, PKPU bertujuan untuk mewujudkan kemandirian masyarakat di bidang perekonomian. Upaya yang ditempuh untuk merealisasikan tujuan tersebut, yakni dengan melakukan program pemberdayaan di tingkat individu, keluarga dan lingkungan. Bidang pendidikan dan kesehatan tak luput dari perhatian, dalam hal ini PKPU-HI mengupayakan solusi untuk meningkatkan kesehatan dan kualitas pendidikan bagi masyarakat. Sementara itu, dalam bidang tanggap darurat, PKPU-HI berupaya untuk melakukan pemberdayaan potensi dan peningkatan kapasitas (*capacitybuilding*) masyarakat.<sup>35</sup>

Secara teori peran *community* adalah akselerator keberhasilan program. tetapi pada program ini sedikit berbeda. Peran *community*

---

<sup>34</sup>Wawancara dengan Riswati, 22/05/2020.

<sup>35</sup>PKPU-HI, "Initiative for Empowerment," *human-initiative.org*, 2017 <<https://human-initiative.org/program/initiative-for-empowerment/>> [diakses 28 Mei 2020].

internal memang sama yaitu sebagai akselerator, tetapi peran *community* eksternal selain akselerator juga sebagai konseptor. PKPU-HI melakukan pemberdayaan potensi dan peningkatan kapasitas (*capacity building*) masyarakat. Sehingga pada program ini PKPU-HI bersama perusahaan mengkonsep program pemberdayaan melalui KWT yang berada di Kelurahan Lomanis.

PKPU-HI memiliki beberapa peran dalam program pemberdayaan ini seperti perencanaan, pelaksanaan hingga monitoring dan evaluasi. Pada tahap perencanaan PKPU-HI berkunjung ke Dinas Ketahanan Pangan dan Kelurahan Lomanis untuk melakukan audiensi terkait program yang akan dilaksanakan. Selain itu juga Menyusun *Base Line Study* guna menjangkau potensi yang ada di masyarakat. Pada tahap Pelaksanaannya PKPU-HI memiliki tim eksekutor untuk melaksanakan kegiatan pelatihan dan penyuluhan oleh pakar pertanian yang dihadirkan langsung dari PKPU-HI. Pada tahap monitoring dan evaluasi PKPU-HI memiliki fasilitator lapangan yang mendampingi keberlanjutan program serta menyusun laporan perkembangan program.

Peran keempat adalah *governance* atau pemerintah. Peran berperan sebagai regulator dan kontroler yakni terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pengambilan keputusan, pengeluaran kebijakan, dan pengendalian. Keterlibatan pemerintah di sini diwakili dari unit terkecil yang berada di masyarakat yaitu ketua RT, ketua RW, Pemerintah Kelurahan Lomanis, dan Dinas Ketahanan Pangan. Ketua RT dan RW bertugas mengarahkan warga masyarakat agar berpartisipasi dalam program selain itu memberikan input atau masukan terkait program yang dilaksanakan agar lebih terarah. Pemerintah Kelurahan Lomanis diwakili Kasi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat melakukan koordinasi untuk melakukan penjangkauan potensiselama berlangsungnya program pemberdayaan. Peran Pemerintah Kelurahan Lomanis juga melegalkan keberadaan KWT Sumber Patedhan RW 01 dan 03 dengan mengeluarkan Surat Keputusan (SK) pendirian kelompok. Peran pemerintah di sini sudah sesuai dengan teori yang ada. Pemerintah berperan sebagai regulator yang memantau keberlanjutan program dan

mengeluarkan kebijakan salah satunya adalah pembentukan surat keputusan pembentukan kelompok.

Peran kelima adalah media. Peran media adalah expender, artinya media berperan dalam publikasi dan promosi. Memang tidak dapat dipungkiri teori penta helix identik dengan analisis yang digunakan dalam mengembangkan UMKM atau Pariwisata, sehingga peran media cukup dipertimbangkan. Pada program pemberdayaan peran media dirasa juga cukup penting meskipun bukan sebagai unsur utama dalam keberhasilan program. Masifnya perkembangan teknologi dan informasi menjadi komponen penting guna mempublikasikan keberhasilan program sehingga dapat dikenal oleh masyarakat luas. Pada program pemberdayaan masyarakat melalui KWT Sumber Patedhan RW 01 dan 03 yang dilaksanakan oleh CSR PT Pertamina (Pesero) Integreted Terminal Cilacap terdapat beberapa media yang terlibat, di antaranya, RADAR BANYUMAS dan Kompasiana. Media-media tersebut meliput berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh KWT pada tahun 2018.<sup>36</sup> Selain itu, juga terdapat website yang digunakan untuk mempublikasikan berbagai program kegiatan yang dapat diakses oleh masyarakat. Pada tahun 2018 melibatkan banyak media disebabkan pada tahun ini launching program dilaksanakan. Sehingga, pada tahun 2019 dan 2020 tidak menunjukkan keterlibatan media yang signifikan dalam program pemberdayaan ini.

#### D. PENUTUP

Program CSR yang dilakukan oleh PT Pertamina Integreted Terminal Feul Cilacap termasuk dalam kategori *corporate citizenship*. Hal ini disebabkan program yang dilakukan perusahaan telah mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan program. Selain itu Program CSR yang baik adalah yang memperhatikan keberlanjutan, yakni dengan mengacu pada *triplebottomline* (profit, people dan planet).Pemberdayaan masyarakat melalui Kelompok Wanita Tani (KWT) merupakan salah satu program CSR yang harus dilaksanakan berdasarkan prinsip tersebut. Agar program dapat berjalan

---

<sup>36</sup>Laporan Program Kelompok Wanita Tani (KWT) Sumber Pathedan RW 01 dan 03,Lomanis Cilacap PKPU Human Initiavite Jawa Tengah tahun 2018, pp. 34–36.

dengan baik, dibutuhkan sinergi dari berbagai pihak. Dalam hal ini peneliti menggunakan analisis *pentahelix*, yakni dengan melibatkan akademisi, bisnis, komunitas, pemerintah dan media.

Sinergi stakeholder juga telah dirasakan dalam program ini. meskipun terdapat beberapa catatan. Merujuk pada pisau analisis yang digunakan dalam penelitian ini, Maka peran *Bisnis, Community, Governance* sudah berjalan dengan baik. Bahkan *community* di sini tidak hanya sebagai akselerator, tetapi juga merangkap menjadi konseptor. Terdapat Peran yang dirasa masih kurang dominan yaitu peran akademisi dan media. Hemat penulis peran akademisi telah diambil alih oleh *community*. Meskipun demikian hal ini bukanlah kesalahan, karena setiap stakeholder tidak menutup kemungkinan memiliki peran ganda.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, Rahadiyand, “Analisis Penta Helix dalam Melihat Keberlanjutan Program CSR Patratu pada Tahun 2017,” *Empower: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 4.2 (2019), 149  
<<https://doi.org/10.24235/empower.v4i2.5320>>
- BPS, *Survei Angkatan Kerja Nasional, BPS RI/BPS-Statistic Indonesia* (Jakarta: CV. Ramsi Sinar Sejahtera, 2019)
- Elkington, J., *Cannibals with Forks: The Triple Bottom Line of 21st Century Business* (Oxford: Capston, 1997)
- H, Abidin, Prihatna A, Saidi Z, Suprpto RA, Supomo S, dan Kurniawati, *Sumbangan Sosial Perusahaan* (Jakarta: Piramedia, 2003)
- Hakiki, Gaib, Sugeng Supriyanto, Asnita Ulfah, Dwi Prastiwi, Widya Larasati, dan Maarif Ibnu Khoer Khoer, *Profil Perempuan Indonesia 2019*, ed. oleh Nur Sahrizal, Piping Setyo Handayani, Idha Sahara, Amiek Chamami, Sylvianti Angraini, Siska Ayu Tiara Dewi Dewi, et al. (Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2019)
- Hanifah Pinesti, Beni, “Pemberdayaa Perempuan Korban Gempa Bumi Melalui Program Kredit Mikro Koperasi Syari’ah Gema di Dusun Miri Sewon Bantul,” *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran dan Dakwah Pembangunan*, 2.2 (2019), 293–318  
<<https://doi.org/10.14421/jpm.2018.022-05>>
- Haryanti, Lena, dan Saptono Nugroho, “Sinergi Stakeholder dalam Mewujudkan Aktivitas Pariwisata di Desa Wisata Baha, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Bandung,” *Jurnal Destinasi Pariwisata*, 5.2 (2018), 195–205
- Istiqomah, “ARAL TERJAL MENGHADANG PEREMPUAN: Studi Pencegahan Kekerasan Bagi Perempuan Oleh LSM Rifka Annisa di Ngalang, Gunungkidul,” *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran dan Dakwah Pembangunan*, 1.1 (2017)

- <<https://doi.org/10.14421/jpm.2017.011-08>>
- J Moeloeng, Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rosda, 2010)
- Jamal, T. & Getz, D., *Collaboration Theory and Community Tourism Planning* (Annals of Tourism Research, 1995), xxii
- Jayani, Dwi Hadya, "Angka Kekerasan terhadap Perempuan Cenderung Meningkat," *katadata.co.id*, 2019  
<<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/09/17/angka-kekerasan-terhadap-perempuan-cenderung-meningkat>> [diakses 27 Mei 2020]
- Junaid, Ilham, "Model Sinergi Unsur Pentaheliks Pariwisata dalam Pengelolaan Destinasi Wisata Kota Parepare dan Kabupaten Bone," *Sosiohumaniora*, 21.1 (2019), 22–33  
<<https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v21i1.17016>> Kebijakan, Jurnal Inovasi, "Matra pembaruan," 2019, 37–46  
<<https://doi.org/10.21787/mp.3.1.2019.37-46>>
- Kusuma, Bayu Mitra A., dan Theresia Octastefani, "Melawan Budaya Kemiskinan: Strategi Implementasi Perda Penanganan Gempeng di Daerah Istimewa Yogyakarta," *WELFARE: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 7.1 (2018) <<https://doi.org/10.14421/welfare.2018.071-02>>
- Malau, Waston, "Pengaruh utama Gender dalam Program Pembangunan," *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 6.2 (2014), 125–31  
<<https://doi.org/https://doi.org/10.24114/jupiiis.v6i2.2292>>
- Noerdin, Edriana, Erni Agustini, Diana Teresa Pakasi, Sita Aripurnami, dan Siti Nurwati Hodijah, *Potret Kemiskinan Perempuan* (Jakarta: Women Research Institute, 2006)
- PKPU-HI, "Initiative for Empowerment," *human-initiative.org*, 2017  
<<https://human-initiative.org/program/initiative-for-empowerment/>> [diakses 28 Mei 2020]
- , *Laporan Program Kelompok Wanita Tani Sumber Patedhan RW 01 & 03 Lomanis Cilacap 2018* (Semarang, 2018)
- , *Laporan Program Kelompok Wanita Tani Sumber Patedhan RW 01 dan 03 Lomanis Cilacap 2019* (Semarang, 2019)
- S. J Sumarto, Hetifah, *Inovasi, Partisipasi dan Good Governance : 20 Prakarsa Inovatif dan Partisipatif Di Indonesia* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003)
- Sodec, *Laporan Socail Mapping di Wilayah Pengembangan Masyarakat PT Pertamina LPG Cilacap, Social Development Studies Center (SODEC)* (Yogyakarta, 2017)
- Susilawati, "Pemberdayaan Perempuan di 'Kampung Damai': Studi Pendampingan Komunitas oleh Wahid Foundation di Gemlengan Klaten," *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran dan Dakwah Pembangunan*, 2.2 (2019), 411–32  
<<https://doi.org/10.14421/jpm.2018.022-10>>
- Syukri, Muhammad, "Pemberdayaan Perempuan dalam Program Penanggulangan Kemiskinan: Seberapa Efektifkah dalam Meningkatkan Kesetaraan Gender?," *The SEMERU Research Institute* (Jakarta, 2013), hal. 1–10

Wawancara :



Wawancara dengan M. R. Putra, 21/05/2020  
Wawancara dengan Rinaldy, 21/05/2020.  
Wawancara dengan Riswati, 22/05/2020